

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Jombang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya diharapkan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dapat dijadikan media untuk membangun komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang telah melaksanakan program kerja tahun 2023 sehingga visi dan misi dapat terlaksana sesuai harapan.

Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang ini



menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh rakyat dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan aparatur pemerintah daerah pada khususnya.

Jombang, Pebruari 2024



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**

BAMBANG SUNTOWO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670904 199202 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Rencana Kerja	29
2.3. Perjanjian Kinerja	34
2.4. Indikator Kinerja Utama	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ...	38
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2	
(dua) tahun terakhir	39
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan	
target jangka menengah	40
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan	
realisasi kinerja di level nasional / internasional	42
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja	43
3.2 Realisasi Anggaran	46
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran ...	47
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	47
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	54
BAB IV : PENUTUP	55
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
5. Pengukuran Kinerja	



BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan dilaksanakan oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional serta memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja (stake holder). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Mendasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang maka dalam rangka mempertanggungjawabkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023. Penyusunan laporan ini juga merupakan keinginan



yang kuat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih Tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan menjalankan misi ke-1 (kesatu) yaitu: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional*** dengan sasaran **(1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi** dan **(2) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur**, ditempuh melalui pengelolaan manajemen ASN dalam Merit Sistem yang diharapkan dapat mewujudkan ASN yang professional dengan program kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah kabupaten Jombang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien serta dukungan dari kecukupan jumlah aparatur yang memberikan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Peningkatan pencapaian kinerja pemerintah. Hal ini karena tingkat kedisiplinan ASN yang belum optimal terutama pemahaman tentang aturan disiplin ASN masih kurang sehingga kinerja pemerintah menjadi rendah;
2. Perlunya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui validasi data SIASN karena Indeks Profesionalitas ASN masih rendah yang disebabkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN belum maksimal;
3. Peningkatan Pelayanan kesejahteraan ASN. Hal ini karena masih terdapat layanan kesejahteraan ASN yang terlambat;



4. Peningkatan kualitas kinerja dan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini karena kompetensi aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan sehingga kualitas kinerja dan kompetensi aparatur kurang optimal;
5. Penerbitan SK pensiun tepat waktu. Hal ini karena usulan pensiun menggunakan aplikasi SIASN yang terkadang terjadi kendala adanya perbaikan sistem aplikasi serta gangguan jaringan koneksi internet;
6. Sistem pengusulan dan penerbitan kenaikan pangkat berbasis paperless menggunakan aplikasi dan data yang akurat dalam SIAP ASN;
7. Otomatisasi pencetakan surat kenaikan gaji berkala yang lebih user friendly;
8. Mengoptimalkan penempatan PNS yang merata dan pola pembinaan karir yang jelas serta sesuai dengan kompetensinya;
9. Mengoptimalkan seleksi perekrutan ASN melalui peningkatan sarana dan prasarana terutama dalam hal ketersediaan gedung dan prasarana CAT, mengingat penggunaan metode CAT semakin meluas yakni untuk rekrutmen Calon ASN, Assesment tes, Job Fit, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
10. Penambahan fitur layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam SIAP ASN. Hal ini karena belum semua layanan dimaksud terfasilitasi dalam aplikasi SIAP ASN serta integrasi data dengan SIASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Jombang adalah membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung Misi ke -1 Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi yang mempunyai indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai tahun 2023 sebesar 76.
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur, yang mempunyai indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target nilai tahun 2023 sebesar 64.

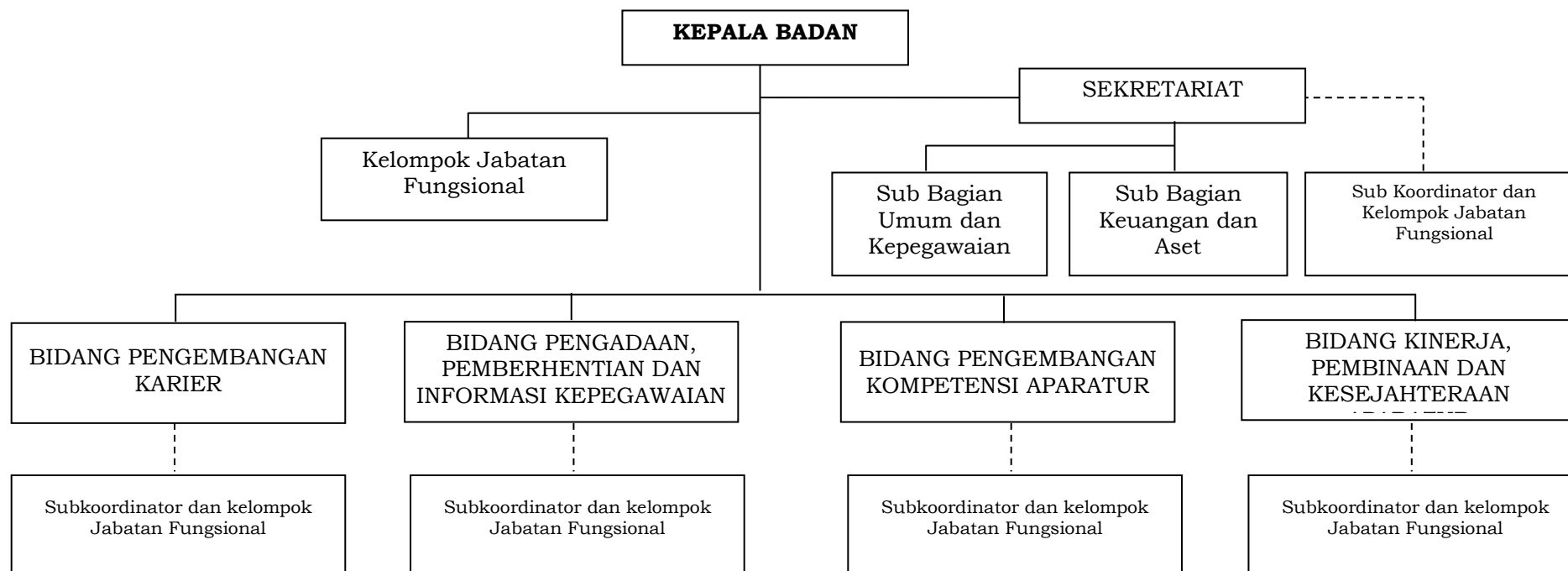
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan Karir, membawahi:



1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada 31 Desember 2023 berjumlah 42 orang dengan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon II, eselon III, eselon IV, jabatan fungsional dan pelaksana serta honorer adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	BAMBANG SUNTOWO , S.E., M.Si	19670904 199202 1 002	Kepala
2	Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M.KP	19671003 199201 2 001	Sekretaris
3	CHRIS MAYA RINELDA, ST., M.KP.	19801007 200212 2 004	Kepala Bidang Kinerja Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
4	MOHAMAD ROFIK, S.Sos.MKP.	19660323 199003 1 012	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
5	SUPARYONO, SE, MM.	19700728 199803 1 007	Kepala Bidang Pengembangan Karir
6	MOKHAMAD BUDI SETIAWAN, SE, MM.	19790213 200604 1 011	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian
7	NURUL RORAYANTI, S.H., M.E	19771112 199703 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
8	NORMA RAHMI, S.Sos	19761016 200112 2 002	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Pegawai Jabatan Fungsional

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	ACHMAD BASORI, S.Sos	196906241993021001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
2	MOKH. IKHWAN, S.IP	197112181997031004	Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda
3	ANDY KUSUMA, S.H	197401202009011001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4	MUFIDAH, S.Si.	19780612 200604 2 044	Perencana Ahli Muda



No.	Nama	NIP	Jabatan
5	TRIANA WIDYASTUTI, S.IP., M.Si.	19880927 200701 2 001	Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda
6	WAHANA AL FATWA , S.Sos., M.A.P.	19811002 201101 1 008	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
7	RENDYANTOKO RINALDI, S.Kom., M.KP.	19830502 201101 1 001	Pranata Komputer Pertama
8	ARISTA WIDYA NUGRAHA, S.Kom.	19871019 201505 1 001	Pranata Komputer Pertama
9	ARYS WAHYU SUSANTO , S.H., M.E.	19830307 201505 1 001	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur
10	ERIE RETNO HANDAYANI, S.H.	19800412 201505 2 001	Analisis Kepegawaian Pertama
11	YANUAR SITI RAHMAWATI , S.Psi.	19950113 202203 2 005	Ahli Pertama - Assessor Sdm Aparatur

Sedangkan jumlah pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 22 orang dan pegawai honorer sebanyak 1 orang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.



2.1. Rencana Strategis

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 - 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dasn Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur				Indeks Profesionalitas ASN	56	70		73		75		78		80		80		BKD	Jombang
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup BKDPP			Nilai evaluasi SAKIP BKDPP	BB	BB		A		A		A		A		A		BKD	Jombang
		4.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	1.095.689.280	92%	1.198.811.030							92%	2.294.500.310	BKD	Jombang
		4.05.06.01.20	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa adminstrasi teknis perkantoran		2 orang	39.600.000	2 orang	40.000.000							2 orang	79.600.000	BKD	Jombang
		4.05.06.01.21	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		25 jenis	1.056.089.280	25 jenis	1.158.811.030							50 jenis	2.214.900.310	BKD	Jombang
		4.05.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	90%	90%	244.850.000	90%	15.950.000.000							90%	15.950.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.45	Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah unit gedung baru yang dibangun		-	-	2 unit, gedung Diklat dan Gedung CAT	7.850.000.000							2 unit, gedung Diklat dan Gedung CAT	7.850.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor		18 unit	100.000.000	14 jenis (sarana gedung BKDPP, diklat dan gedung CAT)	7.800.000.000							14 jenis (sarana gedung BKDPP, diklat dan gedung CAT)	7.900.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.47	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung nan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		5 jenis (utama cat genting)	35.000.000	4 jenis (utama rehab front officer)	150.000.000							4 jenis (utama rehab front officer)	150.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.48	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		4 jenis	39.850.000	4 jenis	60.000.000							4 jenis	60.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.49	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara		28	50.000.000	29	55.000.000							29	55.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.02.65	Pengadaan dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya		50	20.000.000	100	35.000.000							150	55.000.000	BKD	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.05.06.07	Program perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	95%	43.450.000	97%	88.000.000							97%	131.450.000	BKD	Jombang
		4.05.06.07.01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra		0	-	1	35.000.000							1	35.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.07.02	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja yang disusun		6	20.000.000	6	20.000.000							12	40.000.000	BKD	Jombang
		4.05.06.07.03	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen SAKIP yang tersusun		6	15.000.000	6	20.000.000							12	35.000.000	BKD	Jombang
				Jumlah dokumen SOP, SPIP dan IKM		3										3	-	BKD	Jombang
		4.05.06.07.04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan		2	8.450.000	2	13.000.000							4	21.450.000	BKD	Jombang
	Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur			Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	98%	98%		98%		99%		99%		99%		99%		BKD	Jombang
		4.05.04.71	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat belajar	95%	100%	5.884.935.500	100%	6.032.044.800							100%	11.916.980.300	BKD	Jombang
		4.05.04.71.01	Fasilitasi Tugas Belajar	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas		2 org	51.100.000	2 org	51.100.000							2 orang	102.200.000	BKD	Jombang
		4.05.04.71.02	Fasilitasi Prajabatan Diklat	Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirim		427 org	3.472.140.000	450 org	4.159.740.000							877 orang	4.506.880.000	BKD	Jombang
		4.05.04.71.03	Fasilitasi Penjejaan Diklat	Jumlah peserta diklatpim IV, III, dan II		40, 2 orang	831.012.250	40, 4, 4	971.261.000							90 orang	1.802.273.250	BKD	Jombang
		4.05.04.71.04	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsi onal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional		70 org	608.476.750	186 org	696.891.000							256 org	1,305.367.750	BKD	Jombang
		4.05.04.71.05	Fasilitasi Pengembangan Diklat	Jumlah aparatur perwakilan OPD yang mengikuti APKP dan EDD		70 org	20.869.000	145 org	37.492.800							215 org	58.361.800	BKD	Jombang
		4.05.04.71.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus ujian dinas PI dan seleksi JPTP, serta assesment kompetensi.		75 org, 9 JPTP, 45 ass. JPTP	901.337.500	3 org, JPTP	115.560.000							75 org, 12 JPTP, 45 ass JPTP	1.016.897.500	BKD	Jombang
		4.05.06.81	Program Pembinaan Aparatur	Persentase aparatur yang diusulkan sanksi hukuman disiplin	0.70 %	0.55 %	417.340.000	0.50 %	542.924.500							0.50 %	960.264.500	BKD	Jombang
		4.05.06.81.01	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan aparatur	9 layanan	7 layanan	188.655.000	0	-							7 layanan	188.655.000	BKD	Jombang
			Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan aparatur	9 layanan	0	-	8 layanan	145.219.500							8 layanan	145.219.500	BKD	Jombang
		4.05.06.81.02	Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen pembinaan disiplin	5 dokumen	5 dokumen	68.875.000	0	-							5 dokumen	68.875.000	BKD	Jombang
			Pembinaan Aparatur Disiplin	Jumlah Dokumen pembinaan disiplin	5 dokumen	0		5 dokumen	73.318.000							5 dokumen	73.318.000	BKD	Jombang
		4.05.06.81.03	Peningkatan Aparatur Kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja aparatur	6 dokumen	6 dokumen	159.810.000	6 dokumen	324.387.000							12 dokumen	484.197.000	BKD	Jombang
				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan								4 kegiatan			
		4.05.06.83	Program Pengembangan	Persentase berkas usulan	100%	100%	1.288.401.250	100%	2.268.941.250							100%	3.557.342.500	BKD	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Aparatur	formasi yang terverifikasi															
		4.05.06.83.01	Fasilitasi Pemrosesan jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan fungsional yang diproses	-	700 SK	130.540.000	600 SK	261.080.000							1300 SK	391.620.000	BKD	Jombang
		4.05.06.83.02	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen informasi data kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	377.390.000	4 dokumen	477.390.000							8 dokumen	854.780.000	BKD	Jombang
				Persentase dokumen / arsip kepegawaian yang dikelola	95%	95%		95%								95%		BKD	Jombang
		4.05.06.83.03	Pemrosesan CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang diproses	-	428	299.109.750	0	-							428	299.109.750	BKD	Jombang
			Pemrosesan CPNS Daerah dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK yang diproses	-	0	-	450	499.109.750							450		BKD	Jombang
		4.05.06.83.04	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Jumlah usulan formasi OPD	-	65 OPD	481.361.500	69 OPD	1.031.361.500							69 OPD	1.512.723.000	BKD	Jombang
		4.05.06.84	Program Peningkatan Karir Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan	95%	95%	610.395.000	96%	543.105.000							96%	1.153.500.000	BKD	Jombang
		4.05.06.84.01	Fasilitasi Proses Penslun PNS	Jumlah SK pensiun yang diusulkan tepat waktu		540	172.972.500	577	175.500.000							1117	348.472.500	BKD	Jombang
		4.05.06.84.02	Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan		1500	166.155.000	1400	185.605.000							2900	351.760.000	BKD	Jombang
				Jumlah surat kenaikan gaji berkala PNS yang diterbitkan.		4625		3850								8475	-	BKD	Jombang
		4.05.06.84.03	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	Jumlah dokumen inventarisasi mutasi pegawai		5 dokumen	271.267.500	5 dokumen	182.000.000							10 dokumen	453.267.500	BKD	Jombang
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
Meningkatk an Profesional itas Aparatur				Indeks Profesionalitas ASN	58.42					60	-					64	-	BKDPP	Jombang
	Meningkatn ya Kualitas Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai Evaluasi SAKIP	BB					A	-					A	-	BKDPP	Jombang
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKDPP.	-					90%	6.662.613.863					90%	6.662.613.863	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%					100%	35.774.000					100%	35.774.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draf dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 tersusun	-					1	27.802.000					1	27.802.000	BKDPP	Jombang
				Jumlah dokumen renja yang tersusun	2					2						2			
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun.	2					2						2			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, pengendalian kinerja,dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang disusun	10					10	7.972.000					10	7.972.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%					98%	5.646.987.563					98%	5.646.987.563	BKDPP	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%					100%						100%		BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang di fasilitasi	14 kali					14 kali	5.634.052.563					14 kali	5.634.052.563	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	2					2	3.612.500					2	3.612.500	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD	12					12	9.322.500					12	9.322.500	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	343.717.300					100%	343.717.300	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4					4 jenis	4.001.000					4 jenis	4.001.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4					4 jenis	48.116.000					4 jenis	48.116.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	6					6 jenis	2.730.000					6 jenis	2.730.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 kali					11 kali	123.340.000					11 kali	123.340.000	BKDPP	Jombang
				Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi.	12 bulan					12 bulan						12 bulan		BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	- lembar					2500 lembar	58.958.300					2500 lembar	58.958.300	BKDPP	Jombang
				Jumlah pemenuhan barang penggandaan						240 buku						240 buku		BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	0					3 jenis	5.580.000					3 jenis	5.580.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinansi dan rapat	12					12	100.992.000					12	100.992.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	-					100%	467.351.000					100%	467.351.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	3					3	2.681.000					3	2.681.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan					12 bulan	118.212.000					12 bulan	118.212.000	BKDPP	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4 jenis					4 jenis	346.458.000					4 jenis	346.458.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur						0	-					0	-	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0					0	0					0	0	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%					95%	168.784.000					95%	168.784.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara .	1 unit					1 unit	20.204.000					1 unit	20.204.000	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit					1 unit						1 unit		BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara .	29 unit					29 unit	88.580.000					29 unit	88.580.000	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya	29 unit					29 unit						29 unit		BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 gedung					0	-					0	-	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	110					110	60.000.000					110	60.000.000	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.	100%					100%	-					100%	-	BKDPP	Jombang
		5.03.01.2.05.01	Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	0					0	-					0	-	BKDPP	Jombang
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN			Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit.	260	-		-		265	-					275		BKDPP	Jombang
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,84					0,84	6.284.958.200					0,84	6.284.958.200	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kempenan	-					80%	4.805.767.100					80%	4.805.767.100	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN	0					1 dokumen	3.871.906.700					1 dokumen	3.871.906.700	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN	-					3 kegiatan	284.562.100					3 kegiatan	284.562.100	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.01.06	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian	-					2 modul	449.848.800					2 modul	449.848.800	BKDPP	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renssra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.02.2.01.10	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu	471 SK					490 SK	199.449.500					490 SK	199.449.500	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	80 %					82 %	1.004.195.600					82 %	1.004.195.600	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	1. Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses.	-					23	294.718.000					23	294.718.000	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses.						5						5		BKDPP	Jombang
				3. Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses.						125						125		BKDPP	Jombang
				4. Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses.						3						3		BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan	1400					1300	224.173.100					1300	224.173.100	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan.	4229					4058						4058		BKDPP	Jombang
				3. Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus						140						140		BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang diproses	dokumen					2	485.304.500					2	485.304.500	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses	kali					2						2			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	83 %					85 %	108.499.500					85 %	108.499.500	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional diproses.	500 SK					520	65.399.500					520	65.399.500	BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.03.14	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar .	2 orang					2 orang	43.100.000					2 orang	43.100.000	BKDPP	Jombang
				2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui Ijin Belajar						60 orang						60 orang		BKDPP	Jombang
				3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar						30 orang						30 orang		BKDPP	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN berkenaan.						0,2 %	366.496.000					0,2 %	366.496.000	BKDPP	Jombang
				2.Persentase ASN yang memperoleh penghargaan.						98%						98%			
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi						8563	74.538.500					8563	74.538.500	BKDPP	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg, KAris/ Karsu, Klim Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan.						1838	229.667.000					1838	229.667.000	BKDPP	Jombang
				2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang.						2%						2%			
				2.2 Jumlah kegiatan senam ASN						10						10			
				2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan						24						24			
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin						18	62.290.500					18	62.290.500	BKDPP	Jombang
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	16,39					18	4.614.321.675					18	4.614.321.675	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%					100%	646.747.800					100%	646.747.800	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	313					220	634.393.000					220	634.393.000	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta AKPK dan EDD	103					145	12.354.800					145	12.354.800	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.	100%					100%	3.967.573.875					100%	3.967.573.875	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan assesment / uji kompetensi	79,00					50	131.110.800					50	131.110.800	BKDPP	Jombang
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti PKP,PKA, dan PKN Tk.II	44,00					40	670.777.175					40	670.777.175	BKDPP	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS peserta Latsar CPNS						340	3.165.685.900					340	3.165.685.900	BKDPP	Jombang
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi	NA							73.39	-			76		BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB							A	-			A		BKPSDM	Jombang
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKDPP	-							91%	6.630.528.990			91%	6.630.528.990		
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%							100%	50.000.000			100%	50.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah draf dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 tersusun	-							-	20.000.000			-	20.000.000	BKPSDM	Jombang
				Jumlah dokumen renja yang tersusun	2							2				2			
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun.	2							2				2			
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja, pengendalian kinerja, dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang disusun	10							10	30.000.000			10	30.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%							98%	6.226.886.320			98%	6.226.886.320	BKPSDM	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%							100%				100%		BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang di fasilitasi	14 kali							14 kali	6.211.686.320			14 kali	6.211.686.320	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	2							3	4.397.500			3	4.397.500	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2020						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD	12							9	10.802.500			9	10.802.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan								100%	3.500.000			100%	3.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan aset PD yang tersusun								100%	3.500.000			100%	3.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%							100%	158.747.300			100%	158.747.300	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4							1 paket	4.000.000			1 paket	4.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4							4 jenis	66.080.000			4 jenis	66.080.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	6							6 jenis	3.000.000			6 jenis	3.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 kali							11 kali	125.000.000			11 kali	125.000.000	BKPSDM	Jombang
				Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi	12 bulan							12 bulan				12 bulan		BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	- lembar							3000 lembar	60.000.000			3000 lembar	60.000.000	BKPSDM	Jombang
				Jumlah pemenuhan barang penggandaan								240 buku				240 buku		BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	0							3 jenis	5.580.000			3 jenis	5.580.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinasi dan rapat	12							12	100.992.000			12	100.992.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	-							100%	287.122.600			100%	287.122.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	3							2	3.000.000			2	3.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan							12 bulan	124.122.600			12 bulan	124.122.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4 jenis							4 jenis	160.000.000			4 jenis	160.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur								100%	105.250.000			100%	105.250.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0							8	105.250.000			8	105.250.000	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%							95%	379.223.200			95%	379.223.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara .	1 unit							1 unit	21.214.200			1 unit	21.214.200	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit							1 unit				1 unit		BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara .	29 unit							29 unit	93.009.000			29 unit	93.009.000	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya	29 unit							29 unit				29 unit		BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 gedung							1 gedung	200.000.000			1 gedung	200.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	110							111	65.000.000			111	65.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.	100%							100%	27.000.000			100%	27.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05.01	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	0							54 stel	27.000.000			54 stel	27.000.000	BKPSDM	Jombang
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur				Indeks Profesionalitas ASN	58.42							62	-			64	-	BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN			Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	260							270	-			275	-	BKPSDM	Jombang
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,84							0,85	6.768.649.940			0,85	6.768.649.940	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	-							81%	4.930.341.240			81%	4.930.341.240	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN	0							1 dokumen	65.000.000			1 dokumen	65.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN	-							3 keg.	4.200.000.000			3 keg.	4.200.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu	471 SK							568 SK	193.000.000			568 SK	193.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian	-							1 modul	472.341.240			1 modul	472.341.240	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat .	80 %							84 %	1.133.024.750			84 %	1.133.024.750	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	1. Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses.	-							24	324.189.800			24	324.189.800	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses.								5				5			
				3. Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses.								130				130			
				4. Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses.								3				3			
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan	1400							1300	275.000.000			1300	275.000.000	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan.	4229							4789				4789			
				3. Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus								145				145			
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang diproses	dokumen							1	533.834.950			1	533.834.950	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses	kali							2				2			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	83 %							87 %	146.939.450			87 %	146.939.450	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar .	2 orang							3 orang	75.000.000			3 orang	75.000.000	BKPSDM	Jombang
				2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui Ijin Belajar								65 orang				65 orang			
				3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar								35 orang				105 orang		BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses.	500 SK							525	71.939.450			525	71.939.450	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.								0,2 %	558.344.500			0,2 %	558.344.500	BKPSDM	Jombang
				2.Persentase ASN yang memperoleh penghargaan.								98%				98%			
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi								8563	81.992.000			8563	81.992.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg, KAris/ Karsu, Klim Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan.								2.056	262.633.000			2.056	262.633.000	BKPSDM	Jombang
				2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang.								2%				2%			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2.2 Jumlah kegiatan senam ASN								43				43			
				2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan								22				22			
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin								17	213.719.500			17	213.719.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	16,39							19	3.869.711.000			19	3.869.711.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%							100%	941.869.000			100%	941.869.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	313							220	892.250.000			220	892.250.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	103							145	49.619.000			145	49.619.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.	100%							100%	2.927.842.000			100%	2.927.842.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	79,00							120	684.585.000			120	684.585.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	44,00							48	1.144.220.000			48	1.144.220.000	BKPSDM	Jombang
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (KEPMEN 050-5889)																			
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi	NA									76	-	76	-	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2020																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B									A	-	A		BKPSDM	Jombang
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya BKDPP	-									91%	7.089.034.885	91%	7.089.034.885	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%									100%	30.500.000	100%	175.774.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-									3 dokumen	17.500.000	1	102.802.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10									5 laporan	13.000.000	5 laporan	13.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%									98%	6.381.260.095	98%	6.381.260.095	BKPSDM	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%									100%		100%			
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 kali									53 orang/ bulan	6.200.767.095	53 orang/ bulan	6.200.767.095	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-									4 dokumen	176.988.000	4 dokumen	176.988.000		
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD	2									3 laporan	1.058.500	3 laporan	1.058.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD	12									16 laporan	2.446.500	16 laporan	2.446.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%									100%	159.157.800	100%	159.157.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4									1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4									5 paket	64.711.800	5 paket	64.711.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	6									3 paket	1.480.000	3 paket	1.480.000	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 kali									1 paket	5.610.000	1 paket	5.610.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan									2 paket	44.272.000	2 paket	44.272.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-									3 dokumen	2.997.000	3 dokumen	2.997.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12									12 laporan	36.087.000	12 laporan	36.087.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur										100%	61.616.600	100%	61.616.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0									8 unit	61.616.600	8 unit	61.616.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	0									100%	245.687.590	100%	245.687.590	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 bulan									30 laporan	101.658.590	30 laporan	101.658.590	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 jenis									4 laporan	144.029.000	4 laporan	144.029.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%									95%	210.812.800	95%	210.812.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit									1 unit	58.159.200	1 unit	58.159.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan ppajak dan perizinannya	29 unit									26 unit	108.993.600	26 unit	108.993.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	110									46 unit	43.660.000	46 unit	43.660.000	BKPSDM	Jombang
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur				Indeks Profesionalitas ASN	58.42									64	-	64	-	BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN			Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	260									275	-	275	-	BKPSDM	Jombang
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,84									0,86	2.906.741.400	0,86	2.906.741.400	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Peringkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan	-									82%	1.777.721.200	82%	1.777.721.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0									1 dokumen	109.058.000	1 dokumen	109.058.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-									1 dokumen	1.162.169.500	1 dokumen	1.162.169.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	471 SK									595 SK	384.522.000	595 SK	384.522.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-									1 dokumen	121.971.700	1 dokumen	121.971.700	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat.	80 %									86 %	726.250.200	86 %	726.250.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	-									168 dokumen	213.840.600	168 dokumen	213.840.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400									5.208 dokumen	171.511.000	5.208 dokumen	171.511.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen									3 dokumen	340.898.600	3 dokumen	340.898.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	83 %									90 %	144.280.000	90 %	144.280.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	2 orang									400 orang	50.604.000	400 orang	50.604.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang medapatkan layanan pengembangan karir	500 SK									72 orang	93.676.000	72 orang	93.676.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan										0,2 %	258.490.000	0,2 %	258.490.000	BKDPP	Jombang
				2. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan											98%		98%		
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur										8563 dokumen	50.730.500	8563 dokume n	50.730.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan										1.332 orang	181.101.500	1.332 orang	181.101.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan										16 orang	26.658.000	16 orang	26.658.000	BKPSDM	Jombang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dasn Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	16,39									20	2.905.518.500	20	2.905.518.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%									100%	585.955.500	100%	585.955.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	313									201 orang	559.862.600	201 orang	559.862.600	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	103									2 dokumen	26.092.900	2 dokumen	26.092.900	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.	100%									100%	2.319.563.000	100%	2.319.563.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	79,00									120	684.585.000	120	684.585.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	44,00									4 laporan	1.302.071.500	4 laporan	1.302.071.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	??									228 dokumen	343.737.500	228 dokumen	343.737.500	BKPSDM	Jombang



2.2. Rencana Kerja

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023				Bertambah/(Berkurang)		Catatan				
							Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									12.884.030.145				4.682.863.971			13.528.408.645			752.698.632	
5.03	KEPEGAWAIAN									9.957.747.745				3.814.647.977			10.497.305.473			627.113.860	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparaturnya BKPSDM	91	%	100,48	%	91	%	7.341.756.445	50	%	3.340.882.580	91	%	7.494.866.173	0	%	267.281.288			
5.03.01.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100	%	110	%	100	%	17.922.500	55,56	%	4.735.000	100	%	8.774.000	0	%	(16.726.000)			
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	9	dokumen	4	dokumen	15.346.000	2	dokumen	3.295.000	3	dokumen	6.197.500	-1	dokumen	(10.302.500)			
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	20	dokumen	5	dokumen	2.576.500	3	dokumen	1.440.000	5	dokumen	2.576.500	0	dokumen	(6.423.500)			
5.03.01.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98	%	100	%	98	%	6.454.534.415	50	%	3.030.580.891	98	%	6.457.744.415	0	%	76.484.320			
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%		50	%		100	%		0	%		-		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	orang/bulan	28	kali	53	orang/bulan	6.284.031.415	42	orang/bulan	2.943.946.891	44	orang/bulan	6.284.031.415	-9	orang/bulan	83.264.320			
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	24	kali	4	dokumen	166.998.000	2	dokumen	84.639.000	4	dokumen	171.528.000	0	dokumen	(5.460.000)			
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5	dokumen	3	laporan	1.058.900	3	laporan	915.000,00	3	laporan	1.058.500	0	laporan	-			
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	laporan	21	dokumen	16	laporan	2.446.500	8	laporan	1.080.000	16	laporan	1.126.500	0	laporan	(1.320.000)			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan		
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)									
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7	8		9	10		11	12=(10-6)		13=(11-7)	14
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100	%	100	%	100	%	410.500	100	%	-	100	%	200.000			(210.500)	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Laporan	6	dokumen	1	Laporan	410.500	1	Laporan	0	1	Laporan	200.000	0	Laporan	(210.500)	
5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100	%	0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	54	Stel	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	379.018.700	62.07	%	135.044.950	100	%	403.411.600	0	%	101.114.300	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8	jenis	1	paket	4.000.000	1	paket	1.681.000	1	paket	5.008.000	0	paket	1.008.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	7	jenis	5	paket	57.513.800	3	paket	18.070.500	5	paket	69.431.700	0	paket	(2.961.300)	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3	paket	12	jenis	3	paket	1.480.000	-	paket	-	3	paket	1.480.000	0	paket	-	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	22 24	kali bulan	3	paket	143.110.000	3	paket	29.903.000	3	paket	110.110.000	0	paket	(27.500.000)	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	469 94.653	buku lembar	2	paket	83.013.700	2	paket	45.448.850	2	paket	83.481.700	0	paket	35.751.400	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	6	jenis	3	dokumen	4.906.200	3	dokumen	1.520.000	3	dokumen	4.906.200	0	dokumen	1.909.200	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	24	bulan	12	laporan	84.995.000	6	laporan	38.421.600	12	laporan	128.994.000	0	laporan	92.907.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	91,17	%	100	%	60.848.340	100	%	50.100.000	100	%	191.153.710	0	%	129.537.110	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	39	unit	3	unit	60.848.340	3	unit	50.100.000	19	unit	191.153.710	16	unit	129.537.110	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	91,66	%	100	%	241.698.500	54,55	%	104.594.839	100	%	244.226.448	0	%	(1.461.142)	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan		
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)									
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K		Rp.	
1	2	3	4		5		6		7	8		9	10		11	12=(10-6)		13=(11-7)	14
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	laporan	24	bulan	30	laporan	101.658.590	15	laporan	44.797.307	37	laporan	101.811.448	7	laporan	152.858	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	7	jenis	3	laporan	140.040.000	3	laporan	59.797.532	3	laporan	142.415.000	0	laporan	(1.614.000)	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95	%	100	%	95	%	124.015.200	52,53	%	15.826.800	95	%	189.556.000	0	%	(21.256.800)	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	41.010.000	-	unit	0	1	unit	41.010.000	0	unit	(17.149.200)	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	29	unit	26	unit	109.643.400	8	unit	7.866.800	26	unit	99.783.400	0	unit	(9.210.200)	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	72	unit	152	jenis	72	unit	36.670.000	44	unit	7.960.000	71	unit	48.762.600	-1	unit	5.102.600	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kualitas ASN	0,86		0,81		0,86		2.615.991.300			473.765.397	0,86		3.002.439.300	0		234.247.800	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan ASN	81	%	131	%	82	%	1.529.935.100	35,83	%	130.236.724	35	%	1.530.111.100	-47	%	(109.060.200)	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	37.789.000	1	dokumen	5.276.198	1	dokumen	28.757.000	0	dokumen	(10.898.000)	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	dokumen	6	kegiatan	1	dokumen	1.149.555.900	-	dokumen	73.003.994	1	dokumen	900.151.600	0	dokumen	(241.496.500)	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595	dokumen	1170	SK	595	dokumen	214.082.500	314	dokumen	49.844.032	575	dokumen	432.350.500	-20	dokumen	96.454.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	3	modul	1	dokumen	121.972.000	-	dokumen	2.112.500	1	dokumen	168.852.000	0	modul	46.880.300	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat	86	%	89,62	%	86	%	684.886.400	74,25	%	253.202.500	86	%	907.203.900	0	%	180.953.700	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168	dokumen	55 505	surat SK	168	dokumen	195.350.200	95	dokumen	14.897.500	168	dokumen	196.166.800	0	dokumen	(17.673.800)	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan				
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)											
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5208	dokumen	9.841 187	SK orang	5208	dokumen	195.350.200	3448	dokumen	65.337.500	5192	dokumen	248.973.100	-16	dokumen	77.462.100			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	dokumen	4 11	dokumen kali	3	dokumen	331.698.600	3	dokumen	172.967.500	5	dokumen	462.064.000	2	dokumen	121.165.400			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	87	%	91,85	%	90	%	144.280.000	81,16	%	21.051.651	90	%	123.962.500	0	%	(20.317.500)			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72	orang	359	orang	72	orang	93.676.000	70	orang	6.361.651	71	orang	58.228.500	-1	orang	(35.447.500)			
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	1.393	SK	400	orang	50.604.000	264	orang	14.690.000	400	orang	65.734.000	0	orang	15.130.000			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.	0,2	%	0,35	%	0,2	%	256.889.800	0,2	%	69.274.522	0,4	%	441.161.800	0,2	%	182.671.800			
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	98	%	98	%	98	%			%		98	%		0	%	-			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563	dokumen	15.865	SKP	8563	dokumen	49.273.500	5519	dokumen	20.346.450	8563	dokumen	98.738.200	0	dokumen	48.007.700			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332	orang	4.341 6 36 24	surat % kegiatan orang	1332	orang	175.366.800	1833	orang	32.117.250	1332	orang	175.366.800	0	orang	(5.734.700)			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16	orang	38	orang	16	orang	32.249.500	16	orang	16.810.822	30	orang	167.056.800	14	orang	140.398.800			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											868.215.994			3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20		17,74		20		2.896.799.400			868.215.994	20		3.031.103.172	0		125.584.772			
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100	%	125,08	%	100	%	592.117.400	13,80	%	72.786.572	100	%	1.129.159.700	0	%	543.204.300			
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201	orang	1.061	orang	201	orang	566.024.600	31	orang	65.868.472	255	orang	1.118.128.100	54	orang	558.265.500			
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	dokumen	290	orang	2	dokumen	26.092.800	1	dokumen	6.918.100	2	dokumen	11.031.600	0	dokumen	(15.061.200)			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2023		Bertambah/(Berkurang)		Catatan				
							Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)											
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
		Umum																			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	100,44	%	100	%	2.304.682.000	2,82	%	795.429.422	100	%	1.901.943.472	0	%	(417.619.528)			
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265	orang	533	orang	265	orang	673.531.000	-	orang	14.876.500	275	orang	677.489.500	10	orang	3.735.500			
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	laporan	64	orang	4	laporan	1.290.690.500	-	laporan	780.552.922	4	laporan	1.179.155.972	0	laporan	(122.915.528)			
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50	dokumen	547	orang	50	dokumen	340.460.500	3	dokumen	-	50	dokumen	45.298.000	0	dokumen	(298.439.500)			



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Dan pada saat Perubahan APBD tahun 2023 dilakukan perubahan mendasar pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan dilakukan mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun 2022, dimana capaian kinerja tahun 2022 melampaui target kinerja pada tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297,5
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)

No	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Kualitas ASN	0,86	3.000.476.800
2	Program Pengembangan	Meningkatnya kompetensi	Nilai dimensi	20	3.031.103.172



	Sumber Daya Manusia	SDM Aparatur	kompetensi pada IP ASN		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya capaian kinerja aparatur BKPSDM	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91%	7.494.928.473

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebanyak 2 Indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit	Jumlah skor penilaian 8 aspek penerapan sistem merit: 1. Perencanaan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pengembangan karir 4. Promosi dan mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin 7. Perlindungan dan pelayanan	1. Laporan pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan ASN dan sistem informasi 2. Laporan rekapitulasi penilaian kinerja, penghargaan dan	Kepala BKPSDM



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. Sistem Informasi	kesejahteraan seluruh ASN 3. Laporan pengembangan karir, mutasi, penempatan jabatan ASN dan pelaksanaan promosi dan rotasi 4. Hasil penilaian Penerapan Sistem Merit Kabupaten Jombang dari KASN	
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM dari Tim SAKIP kabupaten pada tahun berkenaan	Dokumen AKIP dan evaluasinya	Kepala BKPSDM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang menetapkan tujuan dan pengukuran kinerja sasaran sesuai dalam Matriks Perubahan Renstra tahun 2018-2023. Adapun dalam Matriks Perubahan Renstra tersebut terdapat 2 (dua) tujuan yaitu Meningkatkan Profesionalitas Aparatur yang mempunyai indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target nilai tahun 2023 sebesar 64 serta Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi yang mempunyai indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai tahun 2023 sebesar 76. Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan aplikasi IP ASN yang terdapat dalam aplikasi SI ASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Capaian kinerja IP ASN Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 110,53%, dimana dari target sebesar 64 terealisasi sebesar 70,74, namun nilai ini merupakan nilai perhitungan sementara per 26 September 2023 menunggu penetapan BKN secara resmi, ada kemungkinan nilai IP ASN Kabupaten Jombang lebih tinggi dari nilai dimaksud karena setelah tanggal pengambilan data dan sampai dibuatnya laporan ini aplikasi SI ASN BKN masih belum dapat diakses.. Sedangkan capaian untuk indikator reformasi birokrasi sebesar 99,72%, dimana dari target sebesar 76 telah tercapai sebesar 75,79.

Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang pertama, yaitu: Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN



dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit sebesar 104,87%, dimana dari target sebesar 297,5 tercapai sebesar 312. Sedangkan pada Sasaran Strategis yang kedua, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mencapai 100%, dimana dari target nilai A tercapai nilai A. Namun demikian capaian ini bilamana dilihat dari capaian angka masih dibawah target, dimana dari target 81,05 baru tercapai 80,86 atau 99,77% kurang 0,19 poin.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297,5	312	104,87
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	0,86	0,8967	104,24
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20	19,64	98,20
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (80,86)	100 (99,77)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	91%	103,93	114,21

Berdasarkan tabel 3.1, perbandingan antara target indikator dan realisasinya, didapati bahwa sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit

Pada tahun 2023, target Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit sebesar 297,5 dan tercapai 312 sehingga capaian kinerja Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit tahun 2023 sebesar 104,87%. Hasil ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta dengan



pihak terkait yang menjadi mitra kerja sehingga target sistem merit yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini mempunyai indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai A. Capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%, dimana dari target nilai A yang ditetapkan, telah terealisasi A. Namun bilamana dilihat dari capaian angka masih dibawah target, dimana dari target 81,05 baru tercapai 80,86 atau 99,77% kurang 0,19 poin

Keberhasilan dari sasaran ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran Aparatur di lingkup lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang akan tugas pokok dan fungsinya serta akuntabel. Pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan dalam tahun-tahun selanjutnya akan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada aparatur sipil negara semakin berkualitas.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat berhasil.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Tahun 2023

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297,5	265	295,5	312
- Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualitas ASN	0,86	0,85	0,81	0,8967



Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN	20	17,66	17,74	19,64
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (81,05)	A (80,68)	A (80,86)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	91%	99,17	100,48	103,93

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 realisasi sasaran strategis pada tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada indikator sasaran yang pertama dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit mengalami peningkatan sebanyak 47 poin bilamana dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 265 dan mengalami peningkatan 16,5 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 295,5. Sedangkan pada indikator sasaran yang kedua dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 terealisasi dengan nilai predikat A yang mana sama dengan predikat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 0,18 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 80,68 meskipun masih dibawah capaian pada tahun 2023 yang mencapai 81,05 yang disebabkan oleh perbedaan lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian SAKIP pada tahun 2021 ke 2022.

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Jangka Menengah

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	275	312	113,43



Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	0,86	0,8967	104,27
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20	19,64	98,20
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (80,86)	99,77
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	91%	103,93%	114,21

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.3 yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang didapati bahwa dari dua indikator sasaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dengan capaian sebesar 113,43% serta indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 100% secara predikat namun secara angka capaian Nilai Evaluasi AKIP masih mencapai 99,77% atau kurang 0,19 poin.

Selain itu pada indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota telah mencapai 114,21%. Sedangkan indikator pada Program Kepegawaian Daerah masih mencapai 104,27% serta indikator pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai sebesar 98,20%. Untuk satu program yang belum mencapai target diharapkan pada tahun mendatang dapat tercapai dengan melakukan berbagai inovasi.



3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan level nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Ket
		BKPSDM	BKN	BKN Kanreg Jatim	Pemkot Surabaya	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297,5	339	353	341,5	

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, dimana dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai 5 prioritas kerja antara lain: (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Reformasi Birokrasi; (4) Peyederhanaan Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 merupakan salah satu output penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hadirnya Undang-undang ini membuat manajemen kepegawaian di Indonesia berubah secara signifikan. Mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian Jabatan Tinggi (JPT) diawasi dengan ketat dan pelaksanaannya berdasarkan Sistem Merit. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Sistem Merit didefinisikan sebagai “Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi”. Penerapan Sistem Merit ini berlaku secara Nasional di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit sebesar 297,5. Jika disandingkan dengan hasil nilai yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai 339 serta dengan BKN Kanreg Jatim selaku Pembina dengan nilai 353 masih jauh meskipun secara realisasi sudah melampaui target yang telah direncanakan. Namun demikian nilai kedua instansi pemerintah dimaksud meskipun diatas Kabupaten Jombang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai nilai 341,5.

Dari 597 instansi pemerintah yang dinilai sistem meritnya oleh KASN pada Tahun 2023 terdapat 92 instansi dengan predikat sangat baik, 222 dengan predikat



Baik, 84 instansi dengan predikat Kurang dan 189 instansi berpredikat Buruk. Pemerintah Kabupaten Jombang dengan capaian 297,5 masuk dalam kategori predikat Baik. Dapat dikatakan bahwa nilai yang dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Jombang relative cukup baik bilamana dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya meskipun masih dibawah BKN dan BKN Kanreg Jawa Timur, untuk itu kedepan diharapkan penerapan Sistem Merit bisa lebih optimal melalui berbagai macam inovasi sehingga dapat meningkat mencapai predikat sangat baik atau minimal lebih meningkat dari tahun 2023.

3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang diukur berdasarkan realisasi kinerja atau capaian indikator dari sasaran strategis dan program-program yang dilaksanakan. Atas beberapa capaian keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan kinerja yang telah dicapai akan diuraikan penyebab keberhasilan maupun kegagalan serta peningkatan maupun penurunan kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit tahun 2023 sebagai indikator keberhasilan dari sasaran ini sebesar 312 atau mencapai 104,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 297,5. Capaian ini meningkat sebesar 16,5 poin atau 5,76% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 295,5. Hasil penilaian ini mendasar pada Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:224/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, Dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Keberhasilan peningkatan nilai ini disebabkan oleh:

1. Sudah maksimalnya capaian nilai aspek perencanaan kebutuhan serta aspek pengadaan masing-masing mempunyai nilai 40. Hal ini didukung oleh Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Manajemen PNS maupun Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK, dengan telah disusunnya peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka waktu lima tahun oleh PPK serta, rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan program prioritas pembangunan dan potensi daerah, rencana pengadaan ASN, kebijakan internal berupa standart operasional prosedur tentang tata cara



- penyusunan formasi sampai dengan pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan, penerimaan ASN diumumkan secara luas melalui media sosial, penetapan hasil penerimaan ASN diumumkan secara terbuka dan transparan dan pegawai yang baru diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Adanya peningkatan pada aspek pengembangan karir sebanyak 7,5 poin, dari nilai 57,5 menjadi 65. Capaian ini didukung oleh peningkatan sub aspek ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja sebanyak 5 poin dari nilai 0 menjadi 5 serta sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring dari nilai 2,5 menjadi 5. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyusun laporan kinerja ASN sebagai bahan informasi dalam melihat kesenjangan kinerja ASN serta melakukan upaya pengembangan kompetensi ASN melalui program diklat yang sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat diantaranya diklat manajerial atau kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional serta dilaksanakan praktik kerja/magang dalam rangka mempercepat pengembangan kompetensi ASN serta coaching dan mentoring di beberapa perangkat daerah.
 3. Adanya peningkatan pada aspek promosi dan mutasi, khususnya pada sub aspek pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif sebanyak 2,5 poin, dari nilai 20 menjadi 22,5. Hal ini didukung oleh adanya kebijakan internal (Peraturan Bupati) tentang pola karir (Peta Talenta) yang pada tahun 2023 disempurnakan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kinerja juga sudah menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan promosi, rotasi, mutasi dan pengembangan karir serta pengisian JPT telah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan cara menginformasikan setiap tahapan dalam JPT melalui media massa maupun media elektronik.
 4. Adanya peningkatan pada aspek penggajian, penghargaan dan disiplin sebesar 2,5 poin, dari nilai 37,5 menjadi 40. Hal ini didukung oleh pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai dengan adanya kebijakan internal tentang pembayaran tunjangan kinerja besarnya mendasar pada nilai SKP, SAKIP, disiplin dan juga kinerja harian ASN serta sudah mempunyai kode etik dan kode perilaku yang pada tahun 2023 dilakukan penyempurnaan.



5. Adanya peningkatan pada aspek perlindungan dan pelayanan sebesar 2 poin, dari nilai 12 menjadi 14. Hal ini didukung oleh kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional).
 6. Adanya peningkatan pada aspek sistem informasi sebesar 2 poin, dari nilai 16 menjadi 18. Hal ini didukung oleh Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online, yaitu integrasi SIAP ASN ke SI ASN milik BKN.
2. Sasaran Strategis, Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
Mendasar pada hasil penilaian tim SAKIP Kabupaten, nilai AKIP BKPSM tahun 2023 sama dengan tahun 2022 masuk dalam kategori A (memuaskan). Namun secara nilai mengalami peningkatan 0,18 poin dari nilai 80,68 menjadi 80,86. Hal ini dikarenakan lembar kerja evaluasi (LKE) yang digunakan oleh tim kabupaten sama dengan tahun 2022 meskipun belum maksimal sebagaimana target yang telah ditetapkan sebesar 81,05 atau masih tercapai 99,77%. Peningkatan capaian ini juga disebabkan semakin tingginya kesadaran ASN lingkup BKPSDM khususnya dalam evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam menentukan target selanjutnya.
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2023, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mencapai 103,93% melebihi target yang ditetapkan sebesar 91%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya komitmen semua level dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Disamping itu juga adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, perangkat daerah terkait serta stakeholder.
 4. Program Kepegawaian Daerah
Capaian program kepegawaian daerah pada tahun 2023 sebesar 0,8967 atau 104,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,86. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 mulai Triwulan III semua ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang telah menggunakan Aplikasi E-Kinerja BKN dalam penyusunan Pengelolaan Kinerja Pegawai sehingga memudahkan pemantauan serta integrasi data, dan juga telah dilakukan pendampingan intensif kepada OPD dalam penyusunan laporan kinerja pegawai. Dalam hal pengadaan ASN, Pemerintah



Kabupaten Jombang mengambil kebijakan berdasarkan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun meskipun keputusan jumlah formasi bergantung pada Kementerian PAN/RB dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN yang sangat bergantung dari jumlah DAU. Dan semakin tingginya minat ASN dalam pengembangan kompetensi guna menunjang kinerjanya ditandai dengan semakin banyaknya ijin belajar yang diajukan oleh ASN Kabupaten Jombang.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nilai dimensi kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 sebesar 19,64 atau mencapai 96,30% dari target yang ditetapkan sebesar 20. Namun demikian capaian ini masih jauh dari nilai maksimal yang semestinya sebesar 40 atau masih mencapai 49,1. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN sudah melakukan berbagai upaya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan dasar, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala antara lain antara lain : (1) kesadaran PNS untuk mengembangkan kompetensi masih rendah, (2) perhatian dan dukungan atasan langsung terhadap pengembangan kompetensi staf kurang, (3) Adanya asumsi OPD/PNS bahwa Pengembangan kompetensi PNS hanya dilakukan/tanggungjawab BKPSDM, (4) OPD/PNS masih mengandalkan pengembangan kompetensi secara klasikal dalam mengatasi kesenjangan kompetensi sehingga memerlukan anggaran besar.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2023, sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2023 ini rincian dana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor DPA: DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023. Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya diuraikan dibawah ini:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	297,5	312	104,87	6.031.579.972	5.028.018.686	83,36%
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	0,86	0,8967	104,27	3.000.476.800	2.109.089.877	70,29%
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	20	19,64	98,20	3.031.103.172	2.918.928.809	96,30%
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (80,86)	100 (99,77)	7.494.928.473	6.406.469.082	85,48%
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	91%	103,93%	114,21	7.494.928.473	6.406.469.082	85,48%

Secara keseluruhan anggaran pelaksanaan dari program dan kegiatan dari belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp.13.526.508.445,00 dan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja telah terealisasi sebesar 84,52% yaitu sebesar Rp.11.434.487.768,00

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.2.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	104,87	83,36	25,80
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	104,24	70,29	48,30
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	98,20	96,30	1,97



Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,77	85,48	16,72
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	114,21	85,48	33,61

1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari pagu anggaran sebesar Rp.6.031.579.972,00 terealisasi sebesar Rp.5.028.018.686,00 atau 83,36%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 104,87%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(104,87\%/83,36\% - 1) \times 100\% = 25,80\%$.

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari pagu anggaran sebesar Rp.3.000.476.800 terealisasi sebesar Rp.2.109.089.877,00 atau 70,29%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 104,24%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(104,24\%/70,29\% - 1) \times 100\% = 48,30\%$.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari pagu anggaran sebesar Rp.3.031.103.172,00 terealisasi sebesar Rp.2.918.928.809,00 atau 96,30%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 98,20%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(98,20\%/96,30\% - 1) \times 100\% = 1,97\%$.

- Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka baru tercapai sebesar 99,77% dari target 81,05 terealisasi 80,86. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 99,77% dengan realisasi anggaran 85,48% sehingga untuk



efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(99,77\%/85,48\%-1) \times 100\% = 16,72\%$.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari pagu anggaran sebesar Rp.7.494.928.473,00 terealisasi sebesar Rp.6.406.469.082,00 atau 85,48%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 114,21%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(114,21\%/85,48\%-1) \times 100\% = 33,61\%$.

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk realisasi anggaran 84,53%, rata-rata capaian kinerja sasaran 102,32%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari rata-rata realisasi capaian kinerja di bagi dengan rata-rata realisasi anggaran di kurangi 1 dikalikan 100%, hasilnya $(102,32\%/84,53\% - 1) \times 100\% = 21,05\%$.

3.2.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Salah satu factor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan mempunyai kualitas yang tinggi serta professional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan SDM pada BKPSDM Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi unit kerja mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia



digunakan pendekatan pembandingan jumlah pegawai yang ada dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan (sesuai Analisa Jabatan/ANJAB) mendukung kinerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran didukung oleh 42 pegawai dengan satu pegawai berstatus honorer, jauh dari yang seharusnya sebagaimana jumlah kebutuhan pegawai pada dokumen Analisa Jabatan sebanyak 114 orang atau masih terpenuhi sebesar 36,84% dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 72 orang atau 63,16%.

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan kebutuhan pegawai	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	104,87	36,84	184,66
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	104,24	36,84	182,95
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	98,20	36,84	166,56
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,77	36,84	170,82
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	114,21	36,84	210,02

1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 114 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 36,84%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 104,87%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(104,87\%/36,84\% - 1) \times 100\% = 184,66\%$

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 114 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 36,84%.



Sedangkan capaian kinerja tercapai 104,24%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(104,24\%/36,84\% - 1) \times 100\% = 182,95\%$

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 114 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 36,84%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 98,20%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(98,20\%/44\% - 1) \times 100\% = 166,56\%$

2. Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka baru tercapai sebesar 99,77% dari target 81,05 terealisasi 80,86. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 99,77% dengan kebutuhan sumber daya manusia sebesar 114 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 36,84% sehingga untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(99,77\%/36,84\% - 1) \times 100\% = 170,82\%$.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari kebutuhan sumber daya manusia sebesar 114 orang terpenuhi sebanyak 42 orang atau 36,84%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 114,21%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(114,21\%/36,84\% - 1) \times 100\% = 210,02\%$

Efisiensi pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2 dengan ketersediaan pegawai sebesar 36,84% dan rata-rata capaian kinerja sasaran 102,32% tercapai sebesar $(102,32\%/36,84\% - 1) \times 100\% = 177,74\%$.



3.2.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan kebutuhan sarpras	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	104,87	98,26	6,73
- Program Kepegawaian Daerah	indeks kualitas ASN	104,24	98,26	6,09
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN	98,20	98,26	-0,06
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,77	98,26	1,54
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	114,21	98,26	16,23

Pada BKPSDM Kabupaten Jombang, Ruang lingkup manajemen sarana prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana kantor di lingkungan BKPSDM Kabupaten Jombang menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaannya maupun efisiensi dalam pemanfaatannya.

Jumlah sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Jombang tahun 2023 dalam mendukung pencapaian kinerja sebanyak 622 unit atau sudah terpenuhi sebesar 98,26% dari total kebutuhan sarana dan prasarana sebanyak 633 unit sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Nomor:032/2037/415.41/2023 sehingga terdapat kekurangan sarana dan prasarana sebesar 11 unit.

1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 633 unit terpenuhi sebanyak 622 unit atau 98,26%.



Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 104,87%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(104,87\%/98,26\% - 1) \times 100\% = 6,73\%$.

a. Program Kepegawaian Daerah

Pada Program Kepegawaian Daerah ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 633 unit terpenuhi sebanyak 622 unit atau 98,26%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 104,24%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(104,24\%/98,26\% - 1) \times 100\% = 6,09\%$.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 633 unit terpenuhi sebanyak 622 unit atau 98,26%. Sedangkan capaian kinerja tercapai 98,20%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tidak ada efisiensi namun terdapat pemborosan sebesar $(98,20\%/98,26\% - 1) \times 100\% = -0,06\%$.

2. Sasaran 2 dalam IKU BKPSDM yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan hasil nilai A dan telah sesuai dengan target, sehingga ketercapaian sasaran 2 sebesar 100%. Ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100%. Bila dilihat dari angka baru tercapai sebesar 99,77% dari target 81,05 terealisasi 80,86. Kebutuhan sarana prasarana sebesar 633 unit terpenuhi sebanyak 622 unit atau 98,26%. sehingga untuk efisiensi capaian sasaran yang kedua ini sebesar $(99,77\%/98,22\% - 1) \times 100\% = 1,54\%$.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dari kebutuhan sarana prasarana sebesar 633 unit terpenuhi sebanyak 622 unit atau 98,26%.. Sedangkan capaian kinerja tercapai 114,21%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk program ini tercapai efisiensi sebesar $(114,21\%/98,26\% - 1) \times 100\% = 16,23\%$

Pencapaian sasaran 1 dan sasaran 2, untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 98,26%, rata-rata capaian kinerja sasaran 102,32%, sehingga efisiensi dapat dihitung $(102,23\%/98,26\% - 1) \times 100\% = 4,13\%$.



3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Dari hasil capaian kinerja diatas, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya perlu dilakukan berbagai upaya guna mendukung pencapaian target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 antara lain:

- Penyelarasan Sistem E-Kinerja BKN dengan Aplikasi pemberian penghargaan kepada pegawai yakni Aplikasi TPP;
- Peningkatan kapasitas, baik teknis maupun administrasi bagi pejabat structural dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan pengelolaan kinerja kepegawaian;
- Melakukan pemetaan kompetensi seluruh pegawai melalui assment pegawai;
- Memperdalam analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja seluruh pegawai agar kebutuhan pengembangan kompetensi benar-benar sesuai kebutuhan dan jalur pengembangan;
- Melakukan pengembangan kompetensi secara terjadwal dalam bentuk pelatihan klasikal, non klasikal, Coaching Klinik dan Mentoring;
- Menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil melakukan update data mandiri ASN (UDAMAS) ke aplikasi SIAP ASN khususnya data kualifikasi dan kompetensi.
- Melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala atas capaian dan kendala yang dihadapi serta berkoordinasi secara intensif dengan semua bidang;
- Penerapan Talent Pool dalam pengembangan karier pegawai;
- Berkoordinasi secara intensif dengan Kementrian PAN/RB berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN;
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian guna peningkatan layanan kepada ASN.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.

Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang tahun 2023 masih ada beberapa hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dari Pusat dan Instansi terkait sehingga sering kali kegiatan sudah dianggarkan namun tidak dapat diselenggarakan.



2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan perlu ditingkatkan khususnya kegiatan yang dilaksanakan dengan jeda waktu yang mendesak.
3. Jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait
2. Meningkatkan sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam usaha mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Jombang, Pebruari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**



BAMBANG SUNTOWO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670904 199202 1 002